

Globalisasi dan Deregulasi Ekonomi Indonesia

Oleh : Anggito Abimanyu



Dr. Anggito Abimanyu, lahir pada tanggal 19 Februari 1965 di Bogor strata satu di raihnya dari Fak. Ekonomi UGM tahun 1985, strata dua dari University of Pennsylvania, USA tahun 1990 serta derajat doktor pada Universitas yang sama pada tahun 1993. Saat ini, ia menjabat sebagai staff pengajar FE UGM, associate pada Econit Jakarta dan Konsultan pada World Bank dari tahun 1992 sampai sekarang.

Pendahuluan

Berbagai peristiwa penting yang telah mewarnai dan membentuk arah ekonomi global. Diantaranya: krisis sistem moneter internasional (Bretton Woods), krisis utang luar negeri, krisis minyak dan komoditas primer lainnya, munculnya negara-negara industri baru, (NICs), terjadinya *crash* di pasar modal internasional pada bulan Oktober 1987, bubarnya negara Uni Soviet yang diikuti dengan kecenderungan menuju *free market socialism*, integrasi Eropa menuju Uni Moneter Eropa, disepakatinya pembentukan WTO, dan baru-baru ini ditandatangani Deklarasi Bogor oleh para pemimpin negara-negara anggota APEC. Semua secara terpisah maupun

simultan menunjukkan bahwa kita hidup dalam dunia yang semakin terintegrasi. Gejala globalisasi menjadi suatu keniscayaan. Suatu hal yang tidak dapat dihindari. Bahkan kecenderungan ini menimpa negara-negara yang tadinya mengisolasi diri terhadap dunia luar. Disadari atau tidak, telah terjadi transformasi dari nasionalisasi, ke regionalisasi dan akhirnya globalisasi.

Dengan batas waktu tahun 2020 sebagai era perdagangan dan investasi bebas bagi negara berkembang, bagaimana implikasinya bagi perekonomian Indonesia? Tulisan ini akan menelusur sejauh mana dimensi globalisasi dalam perspektif keuntungan ekonomi dan biaya eksternalitas, dilihat dari upaya deregulasi yang telah dilakukan oleh Indonesia.

Dimensi Global

Bilakita simak baik-baik, gelombang globalisasi yang menghantam aktivitas ekonomi setidaknya memiliki tiga dimensi. **Pertama**, globalisasi telah menyebabkan pergerakan dan mobilitas modal semakin tidak memiliki bendera dan lebih berdasarkan perhitungan rasional ekonomis. Bisa dipahami apabila kemudian banyak negara berkembang berlomba-lomba merebut modal asing, setidaknya bersikap semakin manis. Modal asing dapat berujud investasi asing, investasi portofolio, licensing, maupun franchising. Ini berkaitan dengan dimensi 3F dalam globalisasi gaya hidup menurut Naisbitt dan Aburdene (1990), yaitu makanan (*Food*), mode pakaian (*Fashion*) dan hiburan (*Fun*).

Kedua, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional (TNC) ke seluruh penjuru dunia. Didorong oleh motif mengejar keuntungan global, memperoleh suplai bahan mentah, melayani pasar secara langsung, meminimumkan biaya, dan mengikuti tahap evolutif dalam internasionalisasi bisnis, serta didukung oleh kemampuan memindah uang dan keuntungan diantara perusahaan afiliasasinya secara internal, tak pelak lagi TNC merupakan fenomena yang telah

mewarnai dan membentuk konfigurasi perekonomian global.

Ketiga, terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global, yang memunculkan tiga *megamarkets* ekonomi dunia: (1) Uni Eropa, (2) Amerika Utara dan (3) Asia Timur dan Tenggara (dengan Jepang sebagai motor utama). Tiga kawasan ini mendominasi produksi dan perdagangan global: menghasilkan 70% ekspor dunia dan 62% produk manufaktur dunia, sekaligus juga sebagai sumber dan penerima investasi internasional.

Konstelasi ekonomi global pasca berakhirnya Perang Dingin menunjukkan bahwa blok-blok ekonomi regional telah muncul sebagai trend baru di tengah promosi perdagangan bebas. Tahapan integrasi Eropa dimulai dengan ditandatanganinya Treaty of Rome pada tahun 1957, Single European Act tahun 1986, dan Maastricht Treaty tahun 1991. Dalam Kesepakatan Maastricht, para pemimpin 12 negara anggota MEE telah mencanangkan untuk membentuk Uni Moneter Eropa (EMU) pada akhir abad ini. Harus diakui, diantara blok-blok perdagangan yang ada di seluruh dunia (lihat tabel 1), MEE merupakan blok perdagangan yang paling menonjol dan sering dijadikan model bagi blok perdagangan lain.

Tabel 1
Beberapa Blok-blok perdagangan/Kerjasama Ekonomi Penting di Dunia

Blok regional	Tahun berdiri	Anggota aktif saat ini
Masyarakat Eropa (European Community, or EC)	1957	Belgia, Denmark, Perancis, Yunani, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris, Jerman.
Area Perdagangan Bebas Eropa (EFTA)	1960	Austria, Norway, Swedia, Swiss
Area Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA)	1989	Kanada, Amerika Serikat
Asosiasi Integrasi Amerika Latin (LAIA)	1960	Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Columbia, Ekuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
Pasar Bersama Amerika Tengah (CACM)	1960	Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
The Andean Group	1969	Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru, Venezuela
Masyarakat Karibia (CARICOM)	1973	Antigua, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, St Kitts Nevis-Anguila, St Lucia, St Vincent, Trinidad dan Tobago
ANZERTA	1988	Australia, PNG dan New Zealand
Area Perdagangan Bebas	1992	Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)	1994	NAFTA, AFTA, ANZERTA, Jepang, Korea, Hongkong, China, Taiwan, Chili

Sampai detik ini, kerjasama MEE yang paling berhasil baru dalam bidang perdagangan. Indikasi meningkatnya volume perdagangan antar negara-negara MEE dibanding negara-negara Asia dan Amerika Utara terlihat dalam tabel 2. Ini bukti bahwa "benteng Eropa" sudah mulai aktif berjalan. Dalam literatur ekonomi internasional, kerjasama MEE dalam bidang perdagangan

sudah termasuk suatu bentuk integrasi ekonomi yang bernama *common market*. Ini tingkatan yang integrasi ekonomi yang lebih tinggi dibanding *free trade area* maupun *customs union*, karena dalam suatu *common market* tidak hanya hambatan antar negara anggota dihilangkan dan diterapkannya kebijakan perdagangan yang seragam terhadap non-anggota, namun yang

lebih penting faktor produksi diberi keleluasaan untuk bergerak antar negara anggota.

bentuk regionalisasi di Asia Pasifik seakan mendapat momentum. Singkatnya, pada tahun 1989 secara resmi APEC ditradisikan

Tabel 2
Perdagangan Intra-regional
(sbg proporsi thd total perdagangan)

Tahun	Asia Pasifik	Amerika Utara	MEE
1980	0,00	0,32	0,51
1986	0,32	0,35	0,57
1990	0,37	0,36	0,59

Sumber : Frankel dan Wei (1992)

Untuk mencapai integrasi ekonomi yang paling tinggi atau *economic union*, tidak hanya dibutuhkan penghilangan hambatan perdagangan, namun juga harmonisasi kebijakan ekonomi di bawah pengawasan "supra-nasional". Agaknya ide dasar EMU sejalan dengan konsep integrasi ekonomi yang tertinggi ini. Kalau memang EMU benar-benar terwujud barangkali mitos Eropa bersatu akan segera lenyap. Rencana Eropa bersatu inilah barangkali yang menurut banyak ahli dipandang sebagai salah satu faktor utama pendorong kerjasama APEC.

Sejarah kerjasama ekonomi di Asia Pasifik dimulai dengan dibentuknya OPTAD (Organization for Pasific Trade and Devekopment) pada tahun 1968, yang terdiri dari AS, Jepang, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Ini disusul oleh PECC (Pacific Economic Cooperation Conference) pada tahun 1980, yang aktifitasnya masih terbatas pada mengadakan konferensi dan seminar. Karena kerjasama MEE bergerak menuju arah yang semakin kuat pada dasawarsa 1980-an, upaya mencari

sebagai forum konsultasi antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik, yang mencakup 5 negara anggota OPTAD, 6 negara ASEAN, Korea Selatan, dan Kepulauan Pasifik. Belakangan, Cina, Hongkong, Taiwan bergabung pada tahun 1992, Meksiko pada tahun 1993, dan Chili pada tahun 1994. Dunia mencatat bahwa pertemuan para pemimpin 18 negara APEC pada pertengahan Nopember tahun lalu telah menelorkan Deklarasi Bogor. Intinya, mereka sepakat untuk menjadikan Asia Pasifik sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka secara bertahap: tahun 2010 untuk negara anggota yang relatif maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang.

Banyak yang berkeyakinan bahwa abad ke-21 merupakan abad Asia Pasifik. APEC agaknya merupakan salah satu indikasi. Dilihat dari sisi produksi, sumbangan negara-negara anggota APEC lebih kurang 50% dari seluruh output (GDP) dunia. Dari sisi perdagangan, perdagangan antar negara APEC meningkat dari 9,3% tahun 1980 menjadi 13,5% tahun 1990

terhadap total perdagangan dunia. Bila diperinci, perdagangan intra-Asia Timur merupakan "inti" pertumbuhan, meskipun arus perdagangan dengan Amerika Utara merupakan sumber dinamika perdagangan tersebut (lihat tabel 3).

telah diungkap sebelumnya, negara-negara Asia Timur (termasuk Jepang) adalah kelompok negara yang akan memperoleh dampak positif terbesar.

Dari tabel 4 bisa dilihat bahwa dampak kegiatan perdagangan bagi

Tabel 3
Perdagangan Dunia, Uni Eropa, APEC

	1980		1990	
	Milyar dolar AS	Pangsa (%)	Milyar dolar AS	Pangsa (%)
Perdagangan dunia	4.057,2	—	6.976,5	—
Perdagangan intra-Pasifik	378,0	9,3 ^a	939,3	13,5 ^a
Perdagangan intra-Uni Eropa	309,0	7,6 ^a	753,0	10,8 ^a
Perdagangan intra-Amerika Utara	102,0	28,0 ^b	230,0	24,5 ^b
Perdagangan intra-Asia Timur	100,7	27,0 ^b	286,3	30,5 ^b
Perdagangan intra-ASEAN	24,4	6,6 ^b	53,4	5,7 ^b
Perdagangan antara Amerika	118,6	31,4 ^b	326,0	34,7 ^b

a) Pangsa terhadap perdagangan dunia. b) pangsa terhadap perdagangan intra-Pasifik.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber oleh PAU Studi Ekonomi UGM.

Perdagangan Internasional dan Dampak Ekonomi Domestik

Manfaat bagi tumbuhnya industri terkait, baik itu ke depan maupun ke belakang, tentunya juga akan dirasakan meningkat dengan meningkatnya arus perdagangan luar negeri. Bagi Indonesia, keterkaitan perdagangan internasional bagi pertumbuhan industri terkait di dalam negeri relatif memprihatinkan dibanding dengan negara lain. Dari segi ini memang, seperti

tumbuhnya industri dalam negeri terbesar dinikmati oleh Jepang., disusul Amerika Serikat, negara-negara Asia Timur (termasuk Cina), Indonesia dalam posisi yang relatif paling lemah, sesudah Thailand dan Malaysia. Bisa dimaklumi karena kegiatan perdagangan Indonesia sebagian besar adalah dari minyak bumi yang kurang memberikan keterkaitan yang cukup luas. Sementara itu, dari ekspor di sektor industri, praktis peran yang cukup signifikan hanya berasal dari tekstil dan kayu.

Tabel 4
Perdagangan Intra Asia-Pasifik dan Dampak Kaitan Kedepan/Kebelakang

Forward	Indonesia	Malaysia	Thailand	China	Korea	Japan	USA
Agriculture	4.7790	3.3334	5.9955	5.6380	5.8924	7.1101	6.9974
Industry	12.4531	12.9160	12.4507	14.5686	14.6800	14.7041	14.0038
Food, Beverage	1.0666	1.1986	1.1181	1.1562	1.2068	1.2274	1.3645
Textile	1.1832	1.1783	1.1931	1.1798	1.1970	1.1445	
Wood Prod	1.0049	1.0966	0.9613	1.1771	1.1798	1.1970	1.1445
Pulp&Paper	0.9619	0.9652	1.0021	1.2354	1.2591	1.2255	1.0747
Chemical	0.9801	1.0411	1.0138	1.2228	1.1866	1.2757	1.2170
Petroleum	0.9403	0.8204	0.7439	1.0067	0.7678	0.7767	1.1930
Rubber	1.2076	1.0879	1.1376	1.2084	1.2486	1.2268	1.1211
Mineral	1.0136	1.0482	1.0635	1.1644	1.1311	1.1513	1.0793
Metal Prod	0.9958	1.2154	1.1511	1.2193	1.4154	1.3792	1.1737
Machinery	1.0352	1.1262	0.9972	1.2725	1.2938	1.2705	1.0795
Transport	1.0672	1.0924	1.1646	1.3276	1.2958	1.4550	1.1857
Other	0.9967	1.0457	0.9044	1.2275	1.2985	1.2271	1.0523
Services	4.5226	4.3708	4.5000	4.8472	4.2425	4.3603	4.4266
Total	21.7547	22.6201	22.9462	25.0546	24.8148	26.1744	25.4275
Forward	Indonesia	Malaysia	Thailand	China	Korea	Japan	USA
Agriculture	6.0512	5.8149	5.2372	6.6037	4.7742	4.8533	6.8021
Industry	9.9517	9.7467	10.2672	13.8361	12.8053	19.3512	14.7028
Food, Beverage	0.7912	1.0882	1.1340	1.0279	1.1154	1.1788	1.0486
Textile	0.8693	0.7391	1.1193	1.6828	1.2548	1.2568	1.0365
Wood Prod	0.7153	0.7368	0.6921	0.7222	0.7023	0.7610	0.7423
Pulp&Paper	0.6983	0.6958	0.7270	1.1446	1.0388	1.5524	1.3240
Chemical	0.8273	0.8402	0.6796	1.4646	1.6814	2.8857	2.2825
Petroleum	1.3897	1.1539	1.2699	1.1700	1.4300	1.4716	1.5656
Rubber	1.0504	0.9661	0.9733	0.7819	0.6040	0.6728	0.6255
Mineral	0.6302	0.6939	0.7030	0.9438	0.8500	0.9147	0.7548
Metal Prod	0.7900	0.8120	0.8088	1.6465	1.7264	3.6247	1.7225
Machinery	0.7140	0.7322	0.7535	1.4085	0.9954	2.1825	1.7624
Transport	0.8560	0.6702	0.7678	0.7608	0.6631	1.6709	0.9470
Other	0.6200	0.6183	0.6389	1.0825	0.7437	1.1793	0.8911
Services	5.0299	5.4655	5.7389	5.3771	5.2273	9.0811	9.4073
Total	21.0328	21.0271	21.2433	25.8169	22.8068	33.2856	30.9122

Sumber : International Asia Pacific Input Output, 1985

Deregulasi Ekonomi Indonesia

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah kondisi ekonomi domestik Indonesia sudah siap menyambut era pasar

bebas? Dilihat dari daya kompetisi produk "unggulan" Indonesia dibandingkan dengan dunia, tampak terlihat adanya kelemahan tersebut. Dari tabel 5 bisa diperhatikan

bahwa harga komoditas unggulan Indonesia (terkumpul dari 33 produk) lebih tinggi sekitar 22 persen dibanding harga dunia. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi (dan atau margin keuntungan) produsen penghasil produk tersebut masih belum mampu menyaingi produk sejenis di pasar luar negeri.

Tabel 5
Perbandingan Harga

Comodities	Domestic Over World Price (%)
Textiles	39
Wood Products	-22
Paper	23
Fertilizer	9
Steel	13
Average	

Namun demikian secara makro, deregulasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1983, dan hasilnya telah bisa dirasakan pada saat ini. Kinerja makro menunjukkan adanya perbaikan karena deregulasi. Industri manufaktur adalah sektor yang mendapat manfaat terbesar dari adanya deregulasi tersebut. Pertumbuhan jumlah perusahaan, tenaga kerja, nilai tambah dan ekspor tampak lebih cepat daripada sebelum deregulasi.

Termasuk di dalamnya adalah kebijakan penghematan fiskal yang

berkelanjutan, manajemen nilai tukar yang efektif, dan reformasi perekonomian makro yang tanggap bersama-sama menghasilkan pemulihan yang kuat di awal 1987. Seperti hasil observasi Jamie Mackie dan Sjahrir di bulan Desember 1989. BIES Survey (p.1),

"Di dalam perekonomian Indonesia sedang berlangsung suatu kondisi yang mendekati boom di hampir semua sektor selama 1989. Manfaat yang diperoleh dari berbagai paket deregulasi selama 1986-88, sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya. Produk-produk manufaktur dengan orientasi ekspor mencapai tingkat yang sebelumnya belum pernah ada, sistem perbankan berada dalam keadaan likuiditas yang terombang-ambing, panen padi tahun 1989 sangat baik, sedangkan industri konstruksi mulai beroperasi dengan tingkat yang hampir mencapai kapasitas".

Tidak disangkal bahwasanya sektor industri manufaktur Indonesia tumbuh dengan mengesankan, khususnya selama 5 tahun terakhir ini. Dampak dari deregulasi Paket Oktober 1988, khususnya telah memberikan insentif yang sangat besar bagi pertumbuhan industri manufaktur secara keseluruhan. Menurut data dari BPS yang telah dimutakhirkan dengan metode backcasting, pertumbuhan sektor industri manufaktur pada tahun 1990 dan 1992 mencapai 12% dan 15%, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Tabel 6

Pertumbuhan, Tenaga Kerja dan Konsentrasi Industri, 1986-1992

ISIC	VA80-85	VA86-92	EMP80-85	EMP86-92	PRTK80-85	PRTK86-92	CR4-85	CR4-92
	(riil per tahun)	(riil per tahun)	(pertahun)	(pertahun)	(riil per tahun)	(riil per tahun)	(%)	(%)
Makanan	6.12	11.88	3.98	5.05	1.78	5.45	59.11	61.46
Tekstil	12.85	21.68	7.68	16.89	3.73	2.60	24.89	24.01
Kayu	25.40	22.76	21.37	20.50	1.95	1.11	13.41	15.85
Kertas	18.41	29.51	10.83	7.14	4.91	16.48	43.78	50.21
Kimia	4.94	22.29	9.88	15.76	-3.31	3.65	46.39	44.61
Bukan Logam	15.67	19.22	13.58	15.84	1.24	1.88	75.71	58.06
Besi/Baja	78.27	6.01	16.33	9.10	34.09	-1.12	82.03	71.83
Mesin	7.80	25.51	6.97	12.09	0.62	8.37	49.68	57.36
Lain-lain	19.33	46.32	16.82	34.17	1.36	4.48	71.95	49.01
Total	10.41	18.41	8.13	12.80	1.62	3.42	49.51	47.05

Sumber : Data Industri Backcasting, 1975 - 1992, BPS

Keterangan : VA = Nilai tambah; EMP = tenaga kerja; PRTK = Produktivitas tenaga kerja; dan CR = rasio produksi 4 perusahaan besar.

Kontribusi TFP Indonesia, yang menunjukkan tingkat kemajuan teknologi, terhadap pertumbuhan sektor manufaktur menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, meskipun masih di bawah rata-rata negara-negara Asia Timur. Sesudah deregulasi, kontribusi TFP mencapai pada tingkat 20% pada periode 1986-1992, padahal sebelumnya hampir tidak kentara (tabel 7). Deregulasi, dengan demikian, terbukti telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan bagi kontribusi pertumbuhan teknologi.

Tabel 7

Total Factor Productivity (TFP); Kontribusi pada Pertumbuhan (1985 - 1991, %)

Industry	Kapital	Labor	TFP (%)
Food	14	2	84
Textiles	70	14	16
Wood	38	18	44
Paper	80	7	13
Chemicals	131	23	-54
Non-Metal	216	13	-129
Metal	48	4	48
Machinery	77	11	12
Other	106	26	-32
Total	69	11	20

Namun demikian, ada anggapan bahwasanya deregulasi di bidang perdagangan dan investasi yang dilancarkan pemerintah mulai tahun 1985 tersebut tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah. Bahkan disinyalir hanya perusahaan besar dan konglomerat yang mendapat manfaat terbesar.

Dari tabel 8 terlihat bahwa dibawah

ini setidaknya memberikan dukungan pada argumen mengenai tidak meratanya manfaat yang diterima dari deregulasi. Dengan menggunakan data jumlah perusahaan yang sama pada tahun 1980-1985 untuk sebelum dan 1986-1992 untuk sesudah deregulasi, dianalisis mengenai pola "graduation" dari perusahaan tersebut.

Tabel 8

Tingkat Probabilitas dari Transisi Perubahan Perusahaan Manufaktur Indonesia, 1980-1992

Ukuran Perusahaan	Probabilitas Menjadi Lebih besar		Probabilitas Menjadi Lebih Kecil		Probabilitas Untuk Bangkrut	
	1980/85	1986/92	1980/85	1986/92	180/85	1986/92
Kecil	12	12	32	37	32	37
Menengah 1	21	26	36	38	17	23
Menengah 2	9	14	23	24	11	17
Besar	20	30	29	26	3	13
Sangat Besar	-	-	33	28	4	11

Catatan : Perusahaan Kecil (Small); jumlah tenaga kerja 20 hingga 49 orang
 Perusahaan menengah 1 (Medium1); jumlah tenaga kerja antara 50-99
 Perusahaan menengah 2 (Medium 2); jumlah tenaga kerja antara 100 - 499
 Perusahaan besar (Large); jumlah tenaga kerja 500-1000
 Perusahaan sangat besar (Vary Large); jumlah tenaga kerja 1000 keatas
 Sumber : Data Mentah Perusahaan Industri Manufaktur, BPS dan Bank Dunia.

Dari tabel tersebut ada beberapa hal yang bisa dijelaskan:

Probabilitas untuk menjadi besar. Kemungkinan pertumbuhan ukuran perusahaan menjadi besar tampak nyata (pada periode setelah deregulasi) pada semua kelas, kecuali perusahaan berskala sangat kecil. Secara proporsional peningkatan terbesar terjadi pada perusahaan besar.

Probabilitas untuk menjadi kecil. Kemungkinan perusahaan mengalami degradasi atau bangkrut mengalami peningkatan pada semua kelas kecuali pada perusahaan besar.

Probabilitas untuk bangkrut. Probabilitas perusahaan mengalami bangkrut meningkat di semua kelas. Hal ini menurut Iqbal dan Abimanyu (1995) menunjukkan bahwa (a) tingkat resiko untuk melakukan bisnis meningkat seiring dengan deregulasi dan

(b) menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kemungkinan untuk "naik kelas" lebih besar harus berjuang menerima resiko kegagalan yang lebih besar. Atau artinya, "*higher rewards carry highers risks*".

Deregulasi juga telah menciptakan oportunitas bagi perusahaan pendatang baru. Perusahaan yang berdiri setelah 1985 memberikan kontribusi sebesar 45% dari pertumbuhan nilai tambah dan 40% terhadap pertumbuhan kesempatan kerja. Disamping itu, perusahaan baru lebih giat mengeksport, 25% dan lebih hasil produksi di ekspor, dan tampak cenderung labor intensive; kebutuhan bahan baku per tenaga kerja mencapai 15% lebih rendah. Reformasi di sektor riil dengan demikian membuat Indonesia lebih outward looking dan labor intensive, searah dengan komparatif advantage yang dimiliki Indonesia.

Tabel 9
Perusahaan Baru dan Lama (Total dalam Rp Milyar)

Indicators	< 1986	>1985
Firm (#)	11,490	5,085
Employment (man mill)	2.19	0.79
Production	63.2	18.9
Wages	4.9	1.3
Value Added	23.0	6.9
Exports	12.7	4.7

Referensi

- Abe, S., "Prospects of Asian Economic Integration", paper presented at the conference on "Regional Integration in the Americas and the Pacific Rim", Kobe University, March 28-30, 1994.
- Abimanyu, Anggito and Agus Sartono, "Impact of Import Tarif reduction on Hurdle Rate of Return", *Jurnal kelola II/1994*, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994.
- Abimanyu, Anggito, "Free Trade and Industrial Pollution Havens", *ASEAN Economic Bulletin*, Journal of ISEAS (Institute of South East Asian Studies), Singapore, Juli 1995 (akan datang).
- Balassa, Bela A., "Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage", *The Manchester School of Economic and Social and Statistics*, vol. 61, pp.259-66, 1979.
- Yeats, Alexander J., "On the Appropriate Interpretation of the Revealed Comparative Advantage Index: Implications of a Methodology Based on Industry Sector Analysis", *Weltwirtschaftliches Archiv*, Band 121, pp. 61-73, 1985.